



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN
KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN PROVINSI
PAPUA

KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA TIPE A2 NABIRE

Jalan Merdeka No. 46, Nabire 98815; TELEPON (0984) 21022, 22350; FAKSIMILI (0984) 22156; SITUS
www.djpb.kemenkeu.go.id/kppn/nabire

NOTA DINAS
NOMOR ND-184/KPN.3405/2026

Yth. : Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Papua
Dari : Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Tipe A2 Nabire
Sifat : Segera
Lampiran : Dua Berkas
Hal : Penyampaian Laporan Bulanan Percepatan Pembangunan Papua Provinsi
Papua Tengah Bulan Maret Tahun 2026
Tanggal : 1 April 2026

Sehubungan dengan Surat Kepala Badan Pengarah Papua Jayapura Nomor S3/SETBPP/JYP/JYP.02/2025 Tanggal 5 Februari 2025 Hal Pedoman Penyampaian Laporan Bulanan Percepatan Pembangunan Papua dan Surat Anggota BP3OKP/BPP Provinsi Papua Tengah Nomor 15/IV/2026/BP3OKP.PT Tanggal 1 April 2026 Hal Penyampaian Laporan Bulanan BPP Provinsi Papua Tengah Bulan Maret 2026, dengan ini disampaikan sebagai berikut:

1. Sesuai ketentuan, seluruh Anggota Kelompok Kerja Badan Pengarah Papua agar menyampaikan Laporan Percepatan Pembangunan Papua secara bulanan yang disampaikan paling lambat tanggal 10 setiap bulannya;
2. Berkenaan dengan hal tersebut, kami sampaikan Laporan Bulanan Percepatan Pembangunan Papua Provinsi Papua Tengah Bulan Maret Tahun 2026 sebagaimana terlampir.

Demikian kami sampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.



Ditandatangani secara elektronik
Slamet Riyanto





**BADAN PENGARAH PERCEPATAN PEMBANGUNAN
OTONOMI KHUSUS PAPUA (BP3OKP)
SEKRETARIAT BP3OKP PROVINSI PAPUA TENGAH
JALAN MERDEKA NO 46 NABIRE
Kontak : (0984) 22350; Email: bpp.papteng@gmail.com**

Nomor :15/IV/2026/BP3OKP.PT
Lampiran : Satu Berkas
Hal : Penyampaian Laporan Bulanan BPP Provinsi Papua Tengah Bulan Februari 2026

Kepada Yth
Sekretariat Badan Pengarah Papua
di -
Jayapura

Surat Pengantar

1. Berdasarkan :
 - a) Perpres Nomor 121 Tahun 2022 Badan Pengarah Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua.
 - b) Peraturan Ketua BP3OKP No.1 Tahun 2023 tentang OTK BP3OKP sesuai Pasal 2 dan 3 Tugas dan Fungsi BP3OKP.
2. Berikut ini kami sampaikan Laporan Bulanan BPP Provinsi Papua Tengah bulan Maret Tahun 2026.

Demikian Kami sampaikan, atas perhatian dan kerja samanya Kami ucapkan terima kasih.

Nabire, 1 April 2026

**BADAN PENGARAH PERCEPATAN PEMBANGUNAN
OTONOMI KHUSUS PROVINSI PAPUA TENGAH**



IRJEN POL (P) DRS. PIETRUS WAINE, S.H., M.HUM





Laporan Kegiatan Bulan Maret 2026

**BADAN PERCEPATAN PAPUA
(BPP/BP3OKP)**

Rapat bersama PLN Nabire 04 Maret 2026

Rapat Koordinasi BP3OKP Bersama PLN Nabire Terkait Pembangunan Penerangan di Daerah 3T

- ▶ Badan Pengarah Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua (BP3OKP) melaksanakan rapat koordinasi bersama PLN wilayah Nabire dalam rangka membahas pembangunan penerangan listrik di wilayah **tertinggal, terdepan, dan terluar (3T)**, khususnya di wilayah Papua Tengah.
- ▶ Rapat ini bertujuan untuk mendorong percepatan pemerataan akses listrik bagi masyarakat di daerah 3T yang hingga saat ini masih mengalami keterbatasan infrastruktur penerangan. Dalam pertemuan tersebut, BP3OKP menekankan pentingnya penyediaan lampu penerangan sebagai bagian dari peningkatan kualitas hidup masyarakat, mendukung aktivitas ekonomi, pendidikan, serta keamanan lingkungan.
- ▶ Pihak PLN Nabire menyampaikan kesiapan untuk berkolaborasi dengan pemerintah daerah dan BP3OKP dalam merancang program strategis pembangunan jaringan listrik dan pemasangan lampu penerangan, termasuk pemanfaatan energi alternatif di wilayah yang sulit dijangkau.
- ▶ Melalui rapat ini diharapkan tercapai sinergi yang kuat antara BP3OKP dan PLN dalam mewujudkan pemerataan pembangunan infrastruktur listrik di Papua Tengah, sebagai bagian dari implementasi Otonomi Khusus yang berkeadilan dan berkelanjutan.



Rapat Koordinasi Program Percepatan Pembangunan Papua Sesuai RAPPP Di Biak 5 S.D 7 Maret 2026

Maksud dan tujuan Kegiatan

- Tujuan pelaksanaan kegiatan ini adalah: Mensinkronkan program dan kegiatan percepatan pembangunan Papua antar kementerian/lembaga dan pemerintah daerah. Mengidentifikasi prioritas pembangunan yang mendukung implementasi RAPPP. Memperkuat koordinasi dan kolaborasi antar pemangku kepentingan. Menyusun langkah strategis percepatan pembangunan Papua yang lebih efektif dan terarah

Sinkronisasi Program Prioritas Disepakati beberapa fokus program prioritas percepatan pembangunan Papua, antara lain:

- Penguatan Papua Produktif melalui pengembangan sektor pertanian, perikanan, dan UMKM. Peningkatan kualitas sumber daya manusia Papua melalui pendidikan dan pelatihan. Pengembangan hilirisasi sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah ekonomi daerah. Penguatan infrastruktur dasar dan konektivitas wilayah. Peningkatan pelayanan kesehatan dan kesejahteraan masyarakat.

Penguatan Koordinasi Antar Lembaga

- Rapat koordinasi menghasilkan komitmen bersama untuk meningkatkan koordinasi antar kementerian/lembaga, pemerintah daerah, serta lembaga terkait dalam pelaksanaan program percepatan pembangunan Papua.

Rekomendasi Strategis Beberapa rekomendasi yang dihasilkan antara lain:

- Penyelarasan program pembangunan daerah dengan RAPPP. Peningkatan dukungan anggaran untuk program prioritas. Penguatan peran kelompok kerja (Pokja) dalam implementasi program. Pengembangan sistem monitoring dan evaluasi pelaksanaan program pembangunan Papua.



BP3OKP Menghadiri undangan panen jagung bersama dinas pertanian yang dilaksanakan oleh tani merdeka di wangar nabire barat 10 Maret 2026

Hasil kegiatan

- ▶ Panen raya ini merupakan bukti bahwa masyarakat mampu mengelola potensi pertanian yang ada untuk mendukung ketahanan pangan dan meningkatkan kesejahteraan bersama,” ujar Yusuf Kudiai.
- ▶ Kegiatan panen raya tersebut juga dihadiri oleh sejumlah pihak, di antaranya perwakilan BP3 OKP Provinsi Papua Tengah Ruben Magai, perwakilan dari Dinas Pertanian Kabupaten Nabire, serta Ketua DPW Tani Merdeka Provinsi Papua Tengah Aser Yogi.
- ▶ Dalam kesempatan itu, Aser Yogi memberikan apresiasi atas kerja keras para anggota Kelompok Tani Merdeka yang terus berkomitmen mengembangkan sektor pertanian di wilayah Nabire.
- ▶ “Kami berharap kegiatan seperti ini terus berkembang dan menjadi motivasi bagi kelompok tani lainnya di Nabire maupun wilayah Papua Tengah untuk meningkatkan produksi pertanian,” katanya.
- ▶ Panen raya jagung ini menjadi bukti nyata bahwa Kelompok Tani Merdeka terus berkontribusi dalam mendukung program pertanian serta upaya mewujudkan swasembada pangan di Provinsi Papua Tengah. Diharapkan kegiatan serupa dapat terus dilakukan secara berkelanjutan demi memperkuat ketahanan pangan dan perekonomian masyarakat lokal.



Anggota BPP Melakukan Rapat SHEK bersama Kapolda Papua Tengah pada 11 Maret 2026

Hasil yang di capai

- ▶ Badan Pengarah Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua (BPP) melaksanakan rapat koordinasi bersama Kapolda Papua Tengah dalam rangka meminta dukungan pengamanan dan pengawalan kegiatan penanaman mangrove di wilayah pesisir Nabire.
- ▶ Rapat ini bertujuan untuk memastikan pelaksanaan program penanaman mangrove berjalan aman, tertib, dan lancar, mengingat pentingnya kegiatan tersebut dalam menjaga kelestarian lingkungan pesisir, mencegah abrasi, serta mendukung keberlanjutan ekosistem laut di Papua Tengah.
- ▶ Dalam pertemuan tersebut, BPP menekankan bahwa penanaman mangrove merupakan bagian dari program strategis yang tidak hanya berdampak pada aspek lingkungan, tetapi juga memberikan manfaat ekonomi dan sosial bagi masyarakat pesisir. Oleh karena itu, diperlukan pengawalan dari pihak kepolisian guna mengantisipasi potensi gangguan keamanan selama kegiatan berlangsung.
- ▶ Pihak Polda Papua Tengah menyampaikan komitmennya untuk mendukung kegiatan tersebut melalui pengamanan dan koordinasi dengan aparat di wilayah setempat, sehingga program penanaman mangrove dapat terlaksana secara optimal.
- ▶ Melalui sinergi ini, diharapkan upaya pelestarian lingkungan di wilayah pesisir Nabire dapat berjalan efektif dan memberikan manfaat jangka panjang bagi masyarakat serta generasi mendatang.



KEGIATAN KOORDINASI SHEK BP3OKP POKJA PAPUA SEHAT DENGAN KELUARGA PASIEN OAP DI PAPUA TENGAH TENTANG BIAYA OPERASI DANA KARTU OTONOMI (KO) SEHAT, 12 Maret 2026

Tujuan Kegiatan

- ▶ Menjelaskan prosedur pengurusan klaim pelayanan kesehatan pasien OAP.
- ▶ Mengawal Kartu OTSUS dapat diproses sesuai juknis dan tepat sasaran.
- ▶ Meningkatkan koordinasi antara fasilitas kesehatan dan pengelola dana OTSUS agar dapat tercover kepada pasien yang membutuhkan biaya operasi di luar Papua Tengah.
- ▶ Menjamin hak pelayanan kesehatan bagi masyarakat OAP.



7. Hasil Mediasi

Berdasarkan hasil pembahasan, diperoleh beberapa kesepakatan sebagai berikut:

1. Rencana tindaklanjut menghubungkan pihak terkait pengelola OTSUS agar mudah berkoordinasi dengan pihak keluarga pasien/pasien itu sendiri.
2. Klaim pasien OAP yang telah memenuhi persyaratan administrasi dapat diproses untuk pembayaran melalui dana OTSUS.
3. Fasilitas kesehatan diminta melengkapi dokumen yang belum lengkap.
4. Koordinasi antara pihak terkait akan terus ditingkatkan bagi pasien operasi di Papua. Diharapkan melalui kegiatan ini proses klaim dapat berjalan lebih efektif dan pelayanan kesehatan bagi masyarakat OAP dapat terus ditingkatkan.

9. Penutup

Demikian laporan kegiatan mediasi klaim Kartu OTSUS pasien OAP ini dibuat sebagai dokumentasi kegiatan serta bahan evaluasi kedepan yang lebih baik.

Pokja Papua Produktif dan Papua Sehat Mewakili Anggota BPP Menghadiri Musrembang Otsus di Kabupaten Dogiyai 30 Maret 2026

Hasil kegiatan

- ▶ Kehadiran perwakilan BPP Papua Tengah dalam kegiatan ini merupakan bagian dari komitmen untuk mengawal pelaksanaan Otonomi Khusus (Otsus) agar tepat sasaran, khususnya dalam bidang kesehatan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat asli Papua.
- ▶ Dalam forum tersebut, berbagai usulan prioritas pembangunan dibahas secara bersama antara pemerintah daerah, tokoh masyarakat, dan pemangku kepentingan lainnya. Pokja Papua Produktif dan Papua Sehat turut memberikan masukan strategis terkait penguatan layanan kesehatan, pemberdayaan ekonomi masyarakat, serta peningkatan kualitas sumber daya manusia.
- ▶ Melalui Musrenbang Otsus ini, diharapkan sinergi antara pemerintah dan seluruh elemen masyarakat dapat terus ditingkatkan guna mendorong pembangunan yang berkelanjutan dan berkeadilan di Kabupaten Dogiyai.



Pokja Papua Cerdas Mewakili Kepala BP3OKP Papua Tengah, memberi sambutan pada acara MUSREMBANG Kabupaten Nabire. 31 Maret 2026



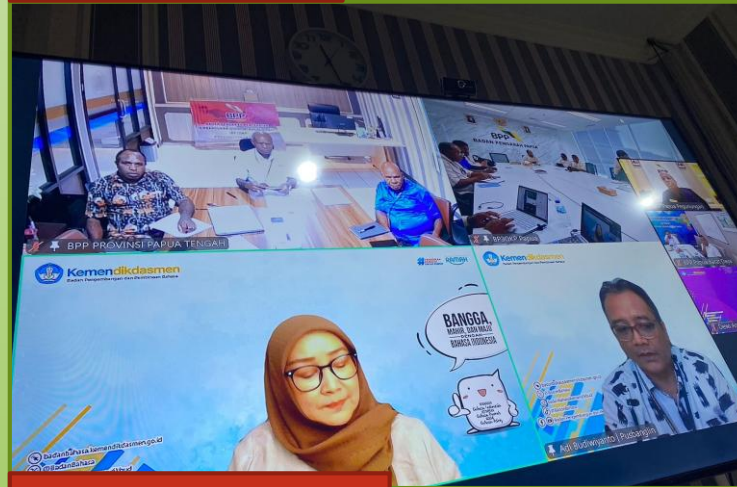
Hasil Kegiatan

- ▶ Kabupaten Nabire, 31 Maret 2026 – Pokja Papua Cerdas mewakili Kepala BP3OKP Papua Tengah menghadiri sekaligus memberikan sambutan dalam kegiatan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) yang dilaksanakan di Kabupaten Nabire.
- ▶ Dalam sambutannya, perwakilan BP3OKP Papua Tengah menegaskan pentingnya perencanaan pembangunan yang berbasis pada kebutuhan riil masyarakat, khususnya dalam sektor pendidikan sebagai fondasi utama peningkatan kualitas sumber daya manusia di Papua Tengah.
- ▶ Kegiatan Musrenbang ini menjadi wadah strategis dalam menyusun program prioritas daerah dengan melibatkan pemerintah, tokoh masyarakat, serta berbagai pemangku kepentingan. Pokja Papua Cerdas juga mendorong agar program Otonomi Khusus (Otsus) dapat diarahkan secara tepat guna dalam meningkatkan akses dan mutu pendidikan bagi masyarakat asli Papua

Rapat zoom Finalisasi struktur panitia dan draf SK Kepanitiaan KBD, 31 Maret 2026

Hasil Rapat

- ▶ Papua Tengah, 31 Maret 2026 - Badan Pengarah Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua (BPP) Papua Tengah bersama Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia melaksanakan rapat secara daring melalui Zoom dalam rangka finalisasi struktur panitia dan penyusunan draf Surat Keputusan (SK) Kepanitiaan Kegiatan KBD.
- ▶ Rapat ini difokuskan pada penyempurnaan susunan kepanitiaan serta penajaman substansi program KBD yang berkaitan dengan penguatan dan pelestarian bahasa, khususnya bahasa daerah di Papua Tengah.
- ▶ Dalam pertemuan tersebut, kedua pihak membahas berbagai aspek penting, mulai dari pembagian tugas dan tanggung jawab panitia, mekanisme pelaksanaan kegiatan, hingga dukungan teknis dari pemerintah pusat dan daerah.



Terima *Kasih*